

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kegiatan ekstrakurikuler

1. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler adalah salah satu bentuk rancangan kegiatan yang akan dilakukan siswa-siswi di luar proses kegiatan belajar. Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 dalam (Kompri, 2015, hal. 224) tentang penerapan Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler dengan penjelasan sebagai berikut, “Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan dibawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau diluar minat yang dikembangkan oleh kurikulum.” Dari apa yang diungkapkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan ekstrakurikuler sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang peserta didik dalam bentuk sikap kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik tersebut. “Kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya terbentuk berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Setiap peserta didik tidak harus mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler. Ia bisa memilih kegiatan mana yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Bisa dikatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan wadah kegiatan peserta didik diluar kegiatan kurikuler (Tim Dosen Adminitrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2017, hal. 212).”

“Kegiatan ekstrakurikuler tersebut sering kali diadakan setiap sore hari untuk sekolah yang melaksanakan pembelajaran pada pagi hari lalu pelaksanaanya juga tepat pada pagi hari apabila pembelajaran dilakukan pada sore hari. Ekstrakurikuler inipun memiliki maksud untuk mengembangkan salah satu bidang yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga, kesenian, dan berbagai kegiatan keterampilan dan kepramukaan (Tim Dosen Jurusan AP FIP IKIP Malang, 1989: 122) dalam (Kompri, 2015, hal. 224).” Menurut Suryobroto (2004: 271) dalam (Kompri, 2015, hal. 224-225) menyatakan bahwa, “kegiatan yang diselenggarakan di

luar jam pelajaran dan tatap muka dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum disebut kegiatan ekstrakurikuler.”

Salah satu ahli bernama Suharsimi Arikunto (1988: 57) dalam (Kompri, 2015, hal. 225) mengatakan, “Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan diluar struktur program yang merupakan kegiatan pilihan.” Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Wahjosumidjo (2007: 256) dalam (Kompri, 2015, hal. 225) mengatakan, “Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan-kegiatan siswa di luar jam pelajaran, yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, mengetahui kegiatan antarberbagai mata pelajaran, penyaluran bakat dan minat, dan dalam rangka usaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan para siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, berbudi pekerti luhur, dan sebagainya.” Dengan apa yang telah disampaikan pendapat beberapa ahli, menyimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan bentuk atau proses kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan bakat pada diri peserta didik yang dilakukan di luar pembelajaran dan tidak diatur oleh kurikulum.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah bentuk kegiatan nonpokok yang dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler (pokok) dengan tujuan agar peserta didik dapat menambah pengetahuan dan memperdalam materi-materi yang telah diajarkan di sekolah oleh pengajar (guru) agar bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kegiatan elementer yang dilaksanakan untuk mengembangkan beberapa aspek yang telah ditentukan dari beberapa temuan dalam kurikulum yang sedang dilakukan, termasuk sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana cara penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan hidup mereka maupun lingkungan sekitarnya (Mulyono, 2009: 186) dalam (Kompri, 2015, hal. 225). Dari pendapat tokoh tersebut dapat dihasilkan kesimpulan bahwa kegiatan ekstrakurikuler bagian dari kegiatan nonpokok atau berada di luar proses pembelajaran.

Kegiatan ekstrakurikuler ini juga dapat membantu mengembangkan potensi peserta didik atau aspek-aspek tertentu yang telah dicanangkan dalam kurikulum, serta bagaimana cara penerapan ilmu tersebut yang telah didapatkan dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

2. Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler

Fungsi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan persekolahan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu.

- a. Fungsi pengembangan, untuk kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk mendukung proses perkembangan diri siswa dengan perluasan minat, potensi yang harus dikembangkan, lalu memberikan pembentukan karakter dan latihan kepemimpinan.
- b. Fungsi sosial, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa dan juga tanggung jawab sosial siswa tersebut. Beberapa kompetensi yang akan dikembangkan diantaranya dengan melalui perluasan pengalaman sosial, praktek keterampilan bersosial, kemudian internalisasi nilai moral dan sosial.
- c. Fungsi rekreatif, maksud fungsi rekreatif ini adalah proses kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan dengan suasana rileks, membuat siswa tersebut bergembira, dan sangat menyenangkan guna membentuk atau membantu proses berkembangnya siswa. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini pun akan menjadikan kehidupan di lingkungan sekolah menjadi lebih menarik dan sangat menantang.
- d. Fungsi persiapan karier, dimana dalam hal ini pun ekstrakurikuler ini dapat membantu siswa atau peserta didik untuk karir kedepan nantinya (Dadang, 2014) dalam (Kompri, 2015, hal. 227).

3. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler

Ada beberapa tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada dunia kependidikan dengan diantaranya ialah sebagai berikut.

1. Ekstrakurikuler disini harus mampu untuk meningkatkan kemampuan diantaranya kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa yang mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler.
2. Dalam ekstrakurikuler pun harus mampu mengembangkan minat dan bakat siswa yang mengikutinya dengan tujuan untuk pembinaan menjadi manusia seutuhnya dengan cara pembinaan secara pribadi (Dadang, 2014) dalam (Kompri, 2015, hal. 227).

4. Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler

Dalam PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 dalam (Kompri, 2015, hal. 228) ada beberapa jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk:

1. Krida; meliputi kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan lainnya;
2. Karya ilmiah; meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
3. Latihan /olah bakat /prestasi; meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lainnya; atau
4. Jenis lainnya.

Selain jenis-jenis ekstrakurikuler, ada juga pelaksanaan ekstrakurikuler dalam berbagai bentuk diantaranya.

- a. Individual, kegiatan ini dilakukan siswa secara perorangan atau masing-masing.
- b. Kelompok, dilakukan dengan cara dibuat menjadi beberapa kelompok.
- c. Klasikal, proses ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan siswa dalam satu kelas.

- d. Gabungan, hal ini hampir serupa dengan bentuk klasikal, namun bentuk ini dapat dilakukan atau diikuti oleh siswa antar kelas.
- e. Lapangan, format ini dapat dilakukan dengan cara siswa melakukan pelaksanaan ekstrakurikuler di area lapangan (Kompri, 2015, hal. 229).

Dalam hal ini pun, ada beberapa jenis ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh pihak sekolah diantaranya sebagai berikut.

1. Organisasi siswa intra sekolah (OSIS)

Osis merupakan suatu bentuk organisasi siswa yang didalam beranggotakan siswa sendiri yang terjun langsung dalam upaya pembentukan organisasi siswa tersebut. Organisasi siswa ini bisa menampung aspirasi siswa yang diwakilkan oleh siswa yang masuk atau menjadi anggota OSIS tersebut.

Menurut para ahli dari Tim Dosen Jurusan AP FIP IKIP Malang (dalam Rifai, 2010) dalam (Kompri, 2015, hal. 230), dibentuknya organisasi ini dengan tujuan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Membuat siswa menjadi seorang warga negara yang mempunyai jiwa Pancasila, mempunyai kepribadian yang luhur, memiliki moral yang tinggi, mampu berkecakapan, mempunyai pengetahuan yang siap diamalkan kepada orang lain.
- b. Menjadikan siswa menjadi warga negara yang patuh dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengabdikan kepada tanah air, dan bangsa melalui persatuan dan kesatuan.
- c. Membentuk suatu kesatuan dan persatuan siswa yang kuat dan akrab dalam satu wadah organisasi.
- d. Pengaruh siswa yang tidak baik semaksimal mungkin dihindari dan juga pencegahan siswa yang mungkin bisa saja dijadikan sasaran pengaruh dan kepentingan golongan tertentu.

2. Pramuka sekolah

Pada suatu lingkungan sekolah diperlukan sebuah situasi yang dapat memungkinkan siswa untuk mendapatkan sebuah kesempatan dalam

mengembangkan potensi siswa dengan melakukan program dan kegiatan yang bersifat nonformal. Contoh dari kegiatan yang dilihat dari bentuknya ialah kegiatan pramuka sekolah yang dilaksanakan pada saat pembelajaran selesai. Dengan diadakan pelaksanaan pramuka ini, dapat juga membantu siswa untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif, kegiatan yang menciptakan atau berdaya hasil bagi pertumbuhan dan perkembangan masing-masing individu. Agar menciptakan kegiatan pramuka yang sangat berguna dan membantu siswa mengembangkan bakat, para pimpinan sekolah pun harus melakukan kegiatan pengendalian, dengan beberapa solusi sebagai berikut.

- a. Mengangkat salah seorang guru sebagai pembina yang sudah mendapatkan penataran seperti kamus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan.
- b. Mengadakan sebuah koordinasi dengan pengurus kepramukaan kwartir cabang dan daerah agar membentuk gugus depan di sekolah.
- c. Turut serta untuk menjadi ketua majelis pembimbing gugus depan, dan diharuskan mengenakan pakaian pramuka.
- d. Ikut berpartisipasi dalam mengadakan alat kelengkapan gugus depan dan bekerja sama dengan pihak koperasi sekolah untuk mengadakan kelengkapan kepramukaan.
- e. Ikut andil dalam mendiskusikan program pramuka dan mengawasi pelaksanaan program tersebut.
- f. Mewujudkan kerja sama gugus depan dengan sekolah lain (Rifai, 2010) dalam (Kompri, 2015, hal. 231).

Sebagai pimpinan sekolah, kepala sekolah wajib untuk ikut serta dalam kegiatan Pramuka di sekolah karena sangat besar pengaruhnya pada kelangsungan gugus depan yang sudah dibentuk tersebut. Disinipun kepala sekolah harus berusaha atau mengusahakan agar pelaksanaan Pramuka di sekolah tidak sekedar sebagai kegiatan musiman, yang hanya beberapa kali muncul saja . Kepala sekolah harus sedapat mungkin untuk mengusahakan dan memprogramkan Pramuka menjadi kegiatan yang bersifat berkelanjutan dan saling berkesinambungan (Rifai , 2010) dalam (Kompri,

2015, hal. 231) . Dalam hal ini pun, kegiatan kepramukaan ini dapat dilaksanakan juga kegiatan pendidikan karakter diantaranya sebagai berikut.

- a. Menumbuhkan kesadaran pada siswa untuk rela berkorban terhadap sesama;
- b. Mengadakan kegiatan 7 K, yang dimaksud dengan 7K adalah keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian dan kerindangan;
- c. Mengadakan agenda kunjungan ke tempat bersejarah seperti monumen;
- d. Mempelajari dan meneruskan nilai-nilai luhur, kepeloporan, dan semangat perjuangan para pahlawan;
- e. Melaksanakan program kegiatan yang bersifat bela Negara;
- f. Perlu dijanya dan dihormati simbol dan lambang negara (Heri Gumawan, 2012, hal. 265).

3. Kegiatan olahraga dan kesenian sekolah

Olahraga dan kesenian disini pun sudah dimasukkan ke dalam pembelajaran. Akan tetapi, apabila kedua bidang tersebut ini diwujudkan di laur proses pembelajaran, pihak sekolah pun harus memiliki perhatian terhadap kedua bidang tersebut. Bentuk perhatian tersebut dapat diterapkan sebagai salah satu bentuk untuk mengendalikan proses pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu juga diperhatikan diantaranya.

- a. Menunjuk penanggung jawab pelaksanaan dari guru dan bertanggung jawab terhadap kepala sekolah atau pihak sekolah.
- b. Memberikan kesempatan kepada guru yang bersangkutan untuk mengikuti peraturan dan kursus sesuai dengan bidang yang akan dijalaninya.
- c. Turut memberikan bantuan berupa alat kelengkapan yang diperlukan dalam bidang tersebut (Rifai, 2010) dalam (Kompri, 2015, hal. 232).

Dengan adanya kegiatan inipun, ada harapan dalam kegiatan olahraga dan kesenian ini, pihak sekolah dapat membuat hubungan antar manusia yang intens. Siswa pun diharapkan bisa belajar menghormati keberhasilan orang lain, memiliki sikap sportif, berjuang menggapai prestasi dengan cara jujur, dan seterusnya (Rifai, 2010) dalam (Kompri, 2015, hal. 232)

4. Majalah sekolah

Kegiatan ekstrakurikuler majalah sekolah ini memiliki banyak karya yang dibuat oleh siswa tersebut. Hasil karyanya dapat berupa prosa atau puisi maupun berita atau kabar mengenai kehidupan sekolah. Majalah sekolah inipun bisa dijadikan sebuah tempat untuk memuat aspirasi atau saran siswa untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kehidupan sekolah. Kegiatan majalah sekolah ini sangat berpengaruh bagi siswa agar mampu mencari tahu dan berperan aktif dalam mencari informasi tentang kehidupan sekolah. Kepala sekolah dalam hal ini dapat memanfaatkan kegiatan majalah sekolah ini, dengan mengetahui nasihat-nasihat yang diberikan oleh siswa untuk perkembangan sekolah nantinya. Menurut Hadari Nawawi (Rifai, 2010) dalam (Kompri, 2015, hal. 233) mengatakan bahwa, "kepala sekolah perlu menaruh perhatian yang besar terhadap penerbitan majalah sekolah agar dapat berkembang secara pesat. Gurupun yang dipercayakan melakukan koordinasi untuk menerbitkan majalah harus berusaha menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya, termasuk juga menjaga agar majalah tersebut tidak disalahgunakan". Oleh karena itu, kegiatan ekstrakurikuler majalah sekolah ini tidak dijadikan suatu hal atau wadah untuk menentang kebijakan sekolah.

5. Palang Merah Remaja (PMR)

"Kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan sebuah salah satu bentuk organisasi yang didalamnya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pelayanan kesehatan dan medis terhadap para korban yang membutuhkan pertolongan. Peran dan fungsi ekstrakurikuler ini sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) (Kompri, 2015, hal. 233)". Dalam hal ini, PMR akan melakukan kerja sama dengan PMI dalam mengembangkan program-program yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan medis kepada masyarakat. Adapun tujuan pengembangan kegiatan PMR ini adalah sebagai berikut.

- a. Dengan melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka akan terbentuk sebuah wadah yang siap dan terampil nantinya.

- b. Menjadikan siswa memiliki mental dan karakter yang gunanya agar mampu memiliki kepekaan dan solidaritas di lingkungan sosial, dan siap kapan saja berkorban demi kepentingan orang banyak.
- c. Nilai kemanusiaan dan keagamaan pun ditanamkan kepada siswa agar menjadi pribadi yang mampu berbuat baik terhadap sesama (Rifai, 2010) dalam (Kompri, 2015, hal.233-234).

Sebagai mitra dalam pelayanan masyarakat, PMR pun dapat melakukan banyak hal dalam kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Mengadakan pelayanan pada masyarakat di sekitar maupun di luar sekolah dan selalu siap kapan pun dan dimana pun pada saat dibutuhkan.
- b. Program pelayanan masyarakat sering diadakan.
- c. Pelatihan diadakan dengan agenda pelatihan pelayanan kesehatan dan medis untuk masyarakat ataupun anggota PMR itu sendiri.
- d. Selalu diadakannya penyuluhan tentang cara hidup sehat, bersih dan lain sebagainya (Rifai, 2010) dalam (Kompri, 2015, hal. 234).

Hasil pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu, banyaknya jenis-jenis ekstrakurikuler yang sesuai minat dan bakat peserta didik. Oleh karena itu, siswa-siswi harus memanfaatkan program ekstrakurikuler yang ada di lingkungan sekolah guna menciptakan atau membangun potensi yang berada dalam diri para siswa tersebut selain dalam hal kegiatan pembelajaran.

5. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan sekolah yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:

1. Pramuka.
2. Paskibraka.
3. Pencak silat.
4. Futsal.
5. Voli.
6. Basket.
7. Lingkup seni sunda siswa (LISSWA).
8. Angklung pager awi.
9. Paduan suara.
10. Acoustic group.
11. GPA "TAPAK."
12. Information technology club (IT CLUB).
13. Rohis qolbun salim.
14. Bela negara.

B. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah bentuk dari kajian teori atau disiplin ilmu yang didalamnya dideskripsikan dalam bentuk hak dan kewajiban suatu warga negara dengan peranan dan kedudukannya sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*). Deskripsi hak dan kewajiban warga negara tersebut sangatlah penting, karena dalam hal ini bisa dijabarkan dengan jelas apa saja hak dan kewajiban warga negara sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*). Pendidikan kewarganegaraan (untuk warga negara) untuk negara Amerika Serikat adalah menjadikan warga negara amerika mejadi orang Amerika (*Theory of americanization*), sedangkan untuk negara Indonesia sendiri Pkn yaitu suatu media yang dijadikan warga negara indonesia untuk menjadikan warga negaranya menjadi orang Indonesia. Walaupun warga tersebut lahir dan besar di negara Indonesia, meninggal pun di negara Indonesia, belum tentu warga negara tersebut berperilaku sejalan dengan nilai dasar yang telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia, dan telah dijadikan suatu prasyarat dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan demokrasi pancasila.

Dalam hal ini pun, Azis Wahab, dkk (2001) dalam (Juliati, 2015, hal. 51, <http://jurnal.fkip-uninus.ac.id/index.php/cisoc/article/view/29>) menyatakan bahwa:

“Pkn ialah media pengajaran yang akan meng-Indonesia-kan para peserta didik secara sadar, cerdas dan penuh tanggung jawab. Karena itu program Pkn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik, hukum, negara serta dari teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut. Dengan kecenderungan sifat teoritis disiplin politik tetap dominan baik dalam program maupun dalam pengajarannya.”

Misi yang diemban pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan warga negara menjadi pribadi yang baik dan memiliki rasa cinta tanah air, yang memungkinkan mejadikan warga negaranya berkembang dari segi mental amupun yang lainnya.

Menurut Winataputra dan Budimansyah (2007:i) dalam (Theodorus Pangalila, 2017, hal. 92, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/3553>) menyatakan bahwa.

“Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam *nation and character building*.”

Sementara, menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68) dalam (Theodorus Pangalila, 2017, hal. 92, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/3553>), menyatakan bahwa.

“Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor value based education.”

Apa yang telah disampaikan para ahli diatas, dapat menarik kesimpulan dari pendapat para ahli tersebut bahwa pendidikan kewarganegaraan suatu media pembelajaran yang membentuk suatu karakter bangsa yang kuat dimulai dari pembelajaran Pkn tersebut. Maka dari itu pembelajran Pkn sangat penting dalam lingkungan pendidikan, baik dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, maupun di perguruan tinggi.

2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan disini sangat penting untuk kedepannya, dengan adanya tujuan tersebut, dapat diketahui apa yang menjadi target atau capaian dari pendidikan kewaganegaraan. Ada beberapa tokoh mengemukakan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan diantaranya sebagai berikut.

Menurut Nu'man Somantri (2001) dan dikutip kembali oleh Wahab dan Sapiya (2011:312) dalam (Theodorus Pangalila, 2017, hal. 92-93, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/3553>), pernah mengemukakan bahwa.

“Tujuan Pkn hendaknya dirinci dalam tujuan kurikuler yang meliputi: (1) Ilmu pengetahuan, yang mencakup fakta, konsep, dan generalisasi; (2) Keterampilan intelektual, dari keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sah, dari berpikir kritis sampai beripikir kreatif; (3) Sikap, meliputi nilai, kepekaan, dan perasaan; dan (4) Keterampilan sosial.”

Menurut Wahab dan Sapriya (2011: 315) dalam (Theodorus Pangalila, 2017, hal. 93, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/3553>) , dalam sistem pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini,

“Tujuan Pkn mengacu pada standar isi mata pelajaran Pkn sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendiknas nomor 22/2006. Tujuan Pkn untuk jenjang SD, SMP, dan SMA tidak berbeda. Semuanya berorientasi pada pengembangan kemampuan/kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual, emosional, dan sosialnya.”

Hasil yang dikemukakan para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dengan dibuatnya pendidikan kewarganegaraan yaitu, dituntut untuk mampu untuk berpikir kritis dan mampu berpikir kreatif. Mengembangkan nilai sikap diantaranya, mempunyai nilai, peka dengan keadaan yang ada, serta memiliki perasaan. Serta mengembangkan kemampuan yang ada pada diri siswa dan disesuaikan dengan tingkat kejiwaan , emosional dan intelektual.

3. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia

Dalam hal ini, sejarah tentang pendidikan kewarganegaraan banyak kisah perjalannya, mulai dari zaman kemerdekaan dan sampai dengan zaman reformasi, dengan penjelasan diantaranya sebagai berikut. (Juliati, 2015, hal. 55-57, <http://jurnal.fkip-uninus.ac.id/index.php/cisoc/article/view/29>)

1. Masa sebelum proklamasi kemerdekaan

“Pelajaran civics sebelum kemerdekaan atau pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama *Burgerskunde*. Pada waktu itu ada dua buku yang digunakan yaitu *Indische Burgerschapkunde* dan *Rech en Plich* (Bambang Daroeso, 1986 : 8-9).”

Dengan dibuatnya buku tersebut, keinginan yang ingin dicapai oleh pemerintahan Hindia Belanda yaitu menginginkan rakyat jajahannya untuk memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintahan Hindia Belanda, sehingga bangsa yang dijajahnya tidak menganggap sebagai musuh terhadap pemerintah Belanda (*My enemy is government*) namun memberikan suatu dukungan yang besar dan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang.

2. Masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Perkembangan PKn setelah proklamasi kemerdekaan digambarkan oleh Nu'man Somantri (1976 : 34-35) diantaranya, "sebagai kewarganegaraan (1957), *civic* (1961), pendidikan kewargaan negara (1968), pendidikan kewargaan negara (1972), pendidikan kewarganegaraan (1989), pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan (PPkn)". Perkembangan pendidikan kewarganegaraan ini mengalami naik turun sekitar tahun 1962 sampai dengan 1998 dan diindikasikan dalam bentuk kemasan ataupun isinya. Kemudian apabila dilihat secara kasat mata terlihat jelas dalam substansi pada kurikulum pendidikan kewarganegaraan selalu saja berubah-ubah dan selalu disesuaikan isinya dengan kepentingan negara.. Jika kita melihat hal tersebut dari segi historisnya, telah terjadi beberapa kali perubahan dari masa ke masa:

- a. Tahun 1957, diberikan nama kewarganegaraan dengan membahas tentang bagaimana cara untuk memperoleh kewarganegaraan dan bagaimana cara mendapatkan kembali apabila kehilangan kewarganegaraan,
- b. Sekitar tahun 1961 berganti nama menjadi *civic* yang menjelaskan akan sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, kemudian pidato kenegaraan,
- c. Tahun 1968 namanya telah diganti dengan kewargaan negara yang didalamnya membahas tentang nasionalisme, patriotisme dan lain sebagainya,
- d. Tepatnya tahun 1975 mengubah nama lagi menjadi pendidikan moral pancasila (PMP) yang berorientasi pada nilai dan UUD 1945,
- e. Setelah mengalami perubahan yang sedemikian rupa, tahun 1994 berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang karakteristiknya didominasi oleh proses *value inculcation* dan *knowledge dissemination*. Dapat dilihat dari isi materi yang ingin disampaikan bahwa hal

tersebut akan memberi arahan untuk menanamkan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta guna mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari (Winataputra dan Budimansyah, 2007 : 97).

Dari pernyataan di atas, diambil kesimpulan bahwa pendidikan warga negara mengalami perubahan begitupun dengan kerangka berpikir, dengan hal ini telah mencerminkan terjadinya krisis konseptual dalam pembuatan materi, dan sangat berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler.

3. Pengembangan PKn di masa era reformasi

Dalam masa ini, tantangan dalam pendidikan warga negara semakin berat saja, dalam masa reformasi ini lebih dikenal dengan nama P4 (pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila) dipertanyakan tentang isinya karena tidak memberikan gambaran yang pasti akan nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini pun Pancasila sebagai azas tunggal tidak diperlukan lagi, karena tidak sesuai dengan rakyat Indonesia yang beranekaragam. Pengalaman yang tidak mengena ini perlu dijadikan pengalaman untuk kedepannya agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran lagi dalam pembelajaran pendidikan warga negara.

Agenda reformasi untuk mengembangkan masyarakat madani merupakan hasil dari pemberdayaan warga negara. Oleh karena itu sebenarnya orientasi PKn akan memperkuat berkembangnya *civil society*. “Suatu masyarakat yang terorganisir yang berdasarkan kesukarelaan, swasembada, dalam ekonomi, berswadaya dalam politik memiliki kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara dan memiliki keterikatan terhadap norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya (lihat Muhamad AS Hikam, 1996 : 3).” Krisis dalam pembentukan konsep ini seharusnya bisa ditanggulangi dengan memperkuat landasan normatif. Hal tersebut secara langsung memperkuat posisi PKn baik dari segi konseptual maupun substantinya.

Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS ini membahas tentang landasan normatif tersebut, lalu dijalankan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar isi, dalam sistem pendidikan nasional ini,

diamanatkan untuk KTSP jenjang sekolah dasar dan menengah disusun dan mengacu pada standar isi dan SKL dengan berpedoman BSNP. Selain itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005.

4. Komponen pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini memfokuskan pada tiga komponen pendidikan kewarganegaraan, yang diantaranya:

1. Civic Knowledge :

Civic knowledge ini mampu disejajarkan dengan ranah kognitif, *civic knowledge* ini sangat erat keterkaitannya dengan isi yang harus diketahui oleh seorang warga negara. *Civic Knowledge* ini juga memiliki isi atau makna yang berkenaan dengan apapun yang terdapat dalam isi tersebut harus diketahui dan dipahami oleh warga negara. Dikatakan bahwa “*Civic-related knowledge, both historical and cotemporary, such as understanding the structure and mechanics of constitutional government, and knowing who the local political actors are and how democratic institutions function.*” (Winarno, 2013, hal 107-108)

2. Civic Skill :

Komponen yang merupakan inti dari pendidikan kewarganegaraan yaitu kemampuan, keterampilan dan kecakapan atau yang biasa disebut *civic skill*. Branson dalam (Winarno, 2013, hal 145-146) menyatakan sebagai berikut.

“Jika warga negara mempraktikkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan sebagaimana diuraikan di muka, namun mereka perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan.” Lebih lanjut dikatakan. “Kecakapan-kecakapan intelektual kewarganegaraan sekalipun dapat dibedakan namun satu sama lain tidak dapat dipisahkan dari kontennya. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu, misalnya seseorang harus memahami terlebih dahulu isu itu,

sejarahnya, dan relevansinya di masa kini, juga serangkaian alat intelektual atau pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan isu itu (Branson, 1998).”

Kecakapan yang paling penting untuk perkembangan mental atau sikapnya adalah bertanggung jawab, efektif dan berfikir kritis.

3. Civic Disposition

Civic disposition bagian dari komponen warga negara yang di dalamnya berisi tentang karakter atau watak apa saja yang harus dimiliki oleh seorang warga negara. merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan. Apabila ditermahkan maka memiliki arti watak, sikap dan karakter warga negara.

C. Civic Disposition

1. Pengertian Civic disposition (Watak kewarganegaraan)

Adalah salah satu komponen dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang terdiri dari karakter publik dan privat. Watak atau karakter inipun berkembang secara perlahan atay sedikit demi sedikit dari apa yang telah dipelajari dari seperti sekolah, lingkungan rumah ataupun organisasi yang diikuti. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasannya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. “Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting, kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses (Branson, 1998) dalam (Winarno, 2013, hal 177-178).” Dalam hal ini pun, karakter privat dan publik akan dijelaskan sebagai berikut (Budimansyah, 2008) dalam (Winarno, 2013, hal 179-181).

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen.

Pada karakter yang dimaksudkan adalah mempunyai kesadaran pribadi maupun rasa tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada, tanpa adanya suatu keterpaksaan atau merasa ada pengawasan, serta mampu menerima konsekuensi dari apa yang telah dilakukan.

2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.

Salah satu bagian yang terpenting, karena tanggung jawab disini diantaranya meliputi menafkahi keluarga, menjaga diri dan lain sebagainya. Dalam urusan negara diantaranya ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan umum dengan memakai hak suara dan lain sebagainya.

3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.

Hal terpenting dari bagian ini adalah menghormati dalam hal mendengar pendapat orang lain, mengikuti musyawarah dalam pemecahan suatu permasalahan yang ada.

4. Berpartisipasi untuk urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.

Diantaranya seperti mengikuti debat publik, ikut dalam diskusi yang serius, dan mengadakan evaluasi tentang kapan saatnya kepentingan banyak orang didahulukan daripada kepentingan pribadi.

5. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Bagian ini pun sangatlah penting, disini warga negara harus sadar informasi yang ada disekitar, memantau keputusan para wakil rakyat. Karakter ini menjadikan warga negara agar dapat bekerja sama dalam hal apapun.

Quigley, CN, Buchanan, JH and Bahmuller, CF dalam *civitas: A Framework for Civic Education*, (1991) dalam (Winarno, 2013, hal. 181) watak kewarganegaraan merupakan bagian dari civic virtue. Dikatakan sebagai berikut:

“Civic virtue is described in terms of civic dispositions and civic commitment. Civic dispositions refer to those attitudes and habits of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system. Civic commitments refer to the freely given, reasoned commitment of the citizen to the fundamental values and principles of American constitutional democracy.”

Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia maka akan sebagai berikut.

“*Civic virtue* merupakan kemauan warga negara untuk menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. *Civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan terdiri atas unsur watak dan komitmen kewarganegaraan. Watak kewarganegaraan merujuk pada sejumlah kebiasaan dan sikap warga negara dalam menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan atas kepentingan umum dalam sistem demokrasi. Komitmen kewarganegaraan merujuk pada kesediaan secara sadar untuk menerima, memegang teguh nilai dan prinsip demokrasi Amerika.”

Winarno mengutarakan pendapatnya tentang *civic virtue*, “*Civic virtue* bisa dikatakan sebagai tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu terbentuknya kebajikan kewarganegaraan pada diri setiap warga yang tentu saja disesuaikan dengan sistem demokrasi konstitusional yang sejalan dengan ideologi nasional negara yang bersangkutan.”

2. Karakter Privat dan Karakter Publik dalam Karakter Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)

“Karakter kewarganegaraan (*civic disposition*), merupakan watak atau sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri. Karakter warga negara mencakup karakter privat (pribadi) karakter publik (kemasyarakatan) yang utama meliputi, menjadi anggota masyarakat yang mandiri, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, menghormati harkat dan martabat tiap individu, berpartisipasi dalam segala urusan negara secara bijak dan efektif, mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat (Cholisin, 2004, hal. 21-23, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/5670/0>).”

3. Isi Civic Disposition dalam PKn sekolah

Civic disposition ini dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dan diterapkan dalam sekolah, untuk jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan jenjang sekolah menengah atas (SMA). Udin S. Winataputra (2001) dalam (Winarno, 2013, hal. 189) kembali mengemukakan sejumlah butir-butir

yang dapat menjadi isi *civic disposition* (nilai atau sikap kewarganegaraan). Butir-butir tersebut sebagai berikut.

1. Mempunyai rasa peduli terhadap permasalahan yang ada disekitar, seperti peduli terjadi permasalahan antar tetangga, dan peduli terhadap permasalahan pribadi diri kita sendiri,
2. Memiliki rasa toleransi akan perbedaan yang ada, seperti perbedaan sosial, ekonomi dan lain sebagainya.
3. Rasa hormat akan hak hidup, hak kebebasan atas dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Hormat atas kedudukan dan lembaga politik, eksonomi, kebudayaan dan sebagainya.
5. Sikap hormat akan kedudukan, tanggung jawab dalam memengang suatu jabatan atau dipercaya untuk memimpin dalam bidang misalkan dari bidang bisnis, profesi dan seterusnya.
6. Saling menghormati antar bangsa kita dengan bangsa lain, agar terjalin persahabatan dan juga perdamaian.
7. Hormat akan hak cipta atau karya milik orang lain dalam berbagai macam bidang.
8. Dalam keputusan bersama yang telah disepakati, harus ada komitmen yang kuat untuk keputusan yang telah diambil secara mufakat dan adil.
9. Memiliki kemauan untuk menerima pendapat dari orang lain, dikritik tentang penampilan dan lain-lain.
10. Selalu kritis akan keadaan atau segala sesuatu yang datang dari luar, dan harus diasadari oleh pribadi kita sendiri selain menurut aturan dalam agama.
11. Terbuka akan kemungkinan adanya kajian ulang akan suatu keputusan yang sudah ditetapkan.
12. Adanya komitmen pada kedudukan, peran, serta tanggung jawab.
13. Jujur akan permasalahan yang telah dibuat oleh kita sendiri.
14. Bersedia “saling asah, asih, dan asuh”, dengan sadar dan tanggung jawab sosial akan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

15. Saling toleransi untuk perasaan atau menjaga perasaan orang lain, dengan sadar dan bertanggung jawab.
16. Norma yang sudah ada dan ditetapkan, harus dipatuhi dan berkomitmen terhadap norma tersebut.
17. Menjadi wakil rakyat, harus memiliki kesadaran akan amanat yang telah diberikan kepadanya sebagai wakil rakyat.
18. Jujur dalam pikiran, perkataan dan perbuatan atas dasar keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
19. Bersedia dan mau untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi.
20. Berkomitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh sepanjang hidup.

Berdasarkan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 dalam (Winarno, 2013, hal. 191) tentang standar kelulusan, dapat kita identifikasi kompetensi kewarganegaraan dalam dimensi watak atau karakter kewarganegaraan, baik untuk PKn tingkat SD, SMP, maupun SMA. Dalam dimensi karakter kewarganegaraan, peserta didik diharapkan untuk :

1. Dengan adanya nilai kejuangan bangsa, mampu menghargai makna yang terkandung dalam nilai tersebut.
2. Menghargai keputusan yang sudah disepakati bersama.
3. Adanya sikap positif yang ditunjukkan kepada norma kebiasaan, adat istiadat dan seterusnya.
4. Adanya perbedaan dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat dengan rasa tanggung jawab, maka akan munculah dengan sendirinya rasa saling menghargai akan perbedaan tersebut.
5. Sikap positif yang terbentuk dengan adanya pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
6. Bersikap kritis dengan adanya dampak dari globalisasi.

1. Isi Civic Disposition dalam PKn Sekolah

Selanjutnya apa yang menjadi isi *civic disposition* dalam PKn sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah pertama hingga menengah atas.

Untuk materi PKn sekolah tingkat dasar, dimensi sikap dan nilai kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat diidentifikasi sebagai berikut (Winarno, 2013, hal. 192).

Tingkatan Kelas	Semester	Dimensi Sikap & Nilai Kewarganegaraan (<i>Civic Disposition</i>)
I (satu)	1	Saling hidup dengan rukun
	2	Tata tertib diikuti sesuai dengan yang sudah disepakati
II (dua)	1	Cinta akan lingkungan sekitar
	2	Memiliki ras atau sikap ingin demokrasi Saling menghargai dengan suara tertinggi Bersikap mau menerima kekalahan dengan lapang dada Sikap jujur dan selalu disiplin
III (tiga)	1	-
	2	Memiliki harga diri Adanya rasa bangga menjadi anak Indonesia
IV (empat)	1	-
	2	-
V (lima)	1	
	2	Keputusan bersama yang harus ditaati dan dipatuhi
VI (enam)	1	-
	2	-

2. Isi Civic Disposition dalam PKn SMP

Untuk materi PKn sekolah tingkat menengah pertama, dimensi sikap dan nilai kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat diidentifikasi sebagai berikut (Winarno, 2013, hal. 193).

Kelas	Semester	Dimensi sikap & Nilai Kewarganegaraan (<i>Civic Disposition</i>)
VII	1	Dengan adanya norma yang berlaku, akan membentuk sikap secara positif Sikap positif yang ditujukan untuk proklamasi kemerdekaan dan konstitusi
	2	Adanya sikap yang positif akan perlindungan terhadap ha asasi manusia (sikap menghargai) Rasa tanggung jawab untuk pendapat yang telah dikemukakan
VIII	1	Bersifat positif akan adanya Pancasila Bersikap positif akan UUD dasar 1945 yang telah diamandemen Selalu taat akan peraturan perundangan yang telah diterapkan
	2	Sikap positif dengan adanya demokrasi di Indonesia Hal positif, terutama dari bersikap akan kedaulatan dan pemerintahan RI
IX	1	Timbul rasa ataun sikap bela negara
	2	Dampak globalisasi yang harus disikapi dengna bijak

3. Isi Civic Disposition dalam PKn SMA

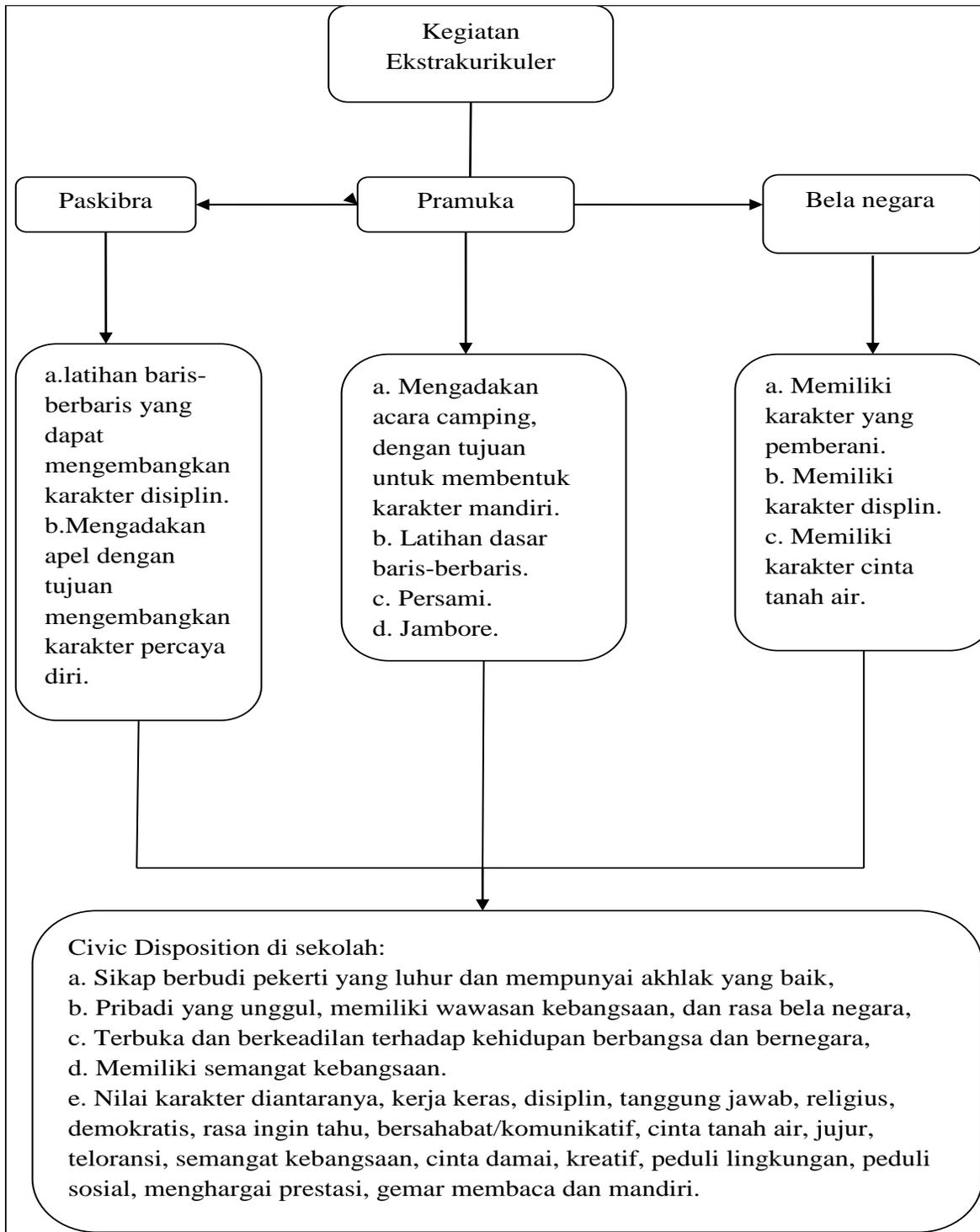
Untuk materi PKn di sekolah tingkat SMA/MA, dimensi sikap dan nilai kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat diidentifikasi sebagai berikut Winarno, 2013, hal. 193).

Kelas	Semester	Dimensi sikap & nilai kewarganegaraan (Civic Disposition)
X	1	Mempunyai semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme Sikap harus menunjukkan sesuai dengan peraturan yang berlaku Sikap positif terhadap sistem dan peradilan nasional
	2	Konstitusi negara yang harus disikapi dengan positif Kedudukan warga negara yang sama harus sangat dihargai
XI	1	Terbuka dan berkeadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara
	2	Mempunyai rasa untuk menghargai akan kerja sama dan perjanjian yang sangat bermanfaat dan menguntungkan Putusan Mahkamah internasional yang harus dihargai
XII	1	Psotif akan pancasila sebagai ideologi yang terbuka
	2	Bersikap akan pengaruh dan implementasi globalisasi di Indonesia

D. Kerangka Pemikiran

Civic disposition merupakan hal sangat mendasar dan bermanfaat dalam perkembangan watak atau karakter warga negara, yang dimana dalam hal ini warga negara dibentuk untuk memiliki watak atau karakter yang kuat. Watak atau karakter yang dimaksud adalah, bagaimana warga negara tersebut mencintai negaranya sendiri dengan menunjukkan karakter yang baik. Seperti, memiliki sikap peduli terhadap demokrasi, ingin berpartisipasi dalam bela negara dan lain sebagainya. *Civic disposition* ini merupakan hal dasar dari pengembangan komponen sebelumnya, yaitu *Civic knowledge* dan *Civic skill*. *Civic disposition* juga dapat dibentuk dari tingkatan pendidikan, dimulai dari tingkat dasar, menengah pertama dan tingkat menengah atas. Pengembangan *Civic disposition* ini, bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat menjadi tempat atau wadah dalam pembentukan watak atau karakter yang baik. Dengan adanya ringkasan tersebut, dapat dibentuk kerangka berpikir diantaranya sebagai berikut:

Gambar 2.1 kerangka pemikiran peneliti



E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat menambah atau memperbanyak materi dari penelitian sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu tersebut, peneliti telah menemukan judul penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti peneliti nantinya. Judul penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

- A. Jurnal dengan judul “Pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap pembentukan Civic Disposition siswa SMK Negeri 1 Semendawai Timur”, dengan pengarang, Fitri Untari Ningrum, Yunisca Nurmalisa, Rohman (2018), <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/17902>. Dengan hasil analisis akhir yaitu, “hasil akhir dari peneliti tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sangat signifikan antara kedua variabel dengan kategori yang kuat dengan hasil 0,71. Kategori kuat dalam hal ini terlihat apda perubahan *civic disposition* siswa yang tercermin dalam saling bekerja sama, mempunyai rasa toleransi, sikap yang baik yaitu disiplin diri, tanggung jawab dalam segala hal termasuk apa yang telah dilakukan, Sopan terhadap orang yang lebih tua. Kategori kuat dapat diartikan kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh terhadap *civic disposition* sudah berjalan dengan baik dan berpengaruh walaupun belum secara maksimal. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi oleh minat siswa yang rendah, kegiatan ekstrakurikuler yang belum secara maksimal berjalan dengan baik, sarana dan prasarana kurang memadai, kesibukan membantu orang tua dirumah, dan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa siswa yang kurang mencerminkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*), selain itu sanksi yang kurang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kurang tegas.”

- B. Jurnal dengan judul “Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka pengembangan nilai-nilai karakter siswa untuk menjadi warga negara yang baik di SMA KOPRI Banjarmasin” dengan pengarang Noor Yanti, Rabiatul Adawiah, Harpani Matnuh (2016), (<https://media.neliti.com/media/publications/120795-ID-pelaksanaan-kegiatan-ekstrakurikuler-dal.pdf>). Dengan hasil penelitian, Karakter yang terdapat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dikembangkan dalam program ekstrakurikuler di SMA KORPRI Banjarmasin antara lain, berusaha untuk bekerja keras, Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, sangat religius dan sebagainya.

F. Hipotesis

1. Hipotesis Penelitian

Dengan adanya pengkajian yang telah disampaikan secara runtut, jawaban sementara yang diambil oleh penulis adalah, bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sangat berpengaruh untuk pengembangan *civic disposition* peserta didik.

2. Hipotesis statistik

$$\mathbf{H_0 : \rho = 0}$$

$$\mathbf{H_1 : \rho \neq 0}$$

Keterangan:

ρ = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan

= 0 (tidak ada pengaruh)

$\neq 0$ (terdapat pengaruh)

H_0 : Tidak adanya pengaruh yang signifikan pengaruh ekstrakurikuler terhadap pembentukan *civic disposition* peserta didik.

H_1 : Adanya pengaruh yang sangat signifikan akan pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap pembentukan *civic disposition* peserta didik.